



THE ROLE OF THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF NORTH SUMATERA PROVINCE IN PREVENTING DRUG ABUSE AMONG ADOLESCENTS

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI REMAJA

Asrina Putri Hasibuan¹, Franklin Asido Rossevelt²

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara

E-mail: aasrinaputri@gmail.com¹, franklin@usu.ac.id²

ARTICLE INFO

Correspondent

Asrina Putri Hasibuan
aasrinaputri@gmail.com

key words:

Drug Abuse, Narcotics,
Prevention

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1240-1253

ABSTRACT

The issue of drug abuse, particularly among adolescents, poses a serious threat to a nation. The Indonesia Drugs Report 2022, published by the Data and Information Research Center of the National Narcotics Board (Puslitdatin BNN), indicates that in 2021, as many as 4.8 million people aged 15-65 years were exposed to or had used drugs. This figure increased from 4.5 million people in 2019. The North Sumatra Provincial National Narcotics Board plays an important role in prevention initiatives due to the high rate of drug abuse in the region. This study used descriptive research with qualitative methodology. The researchers used interview, observation, and documentation techniques to collect data as research aids. The collected data was evaluated using the role theory articulated by Jim Ife and Frank Tesoriero, namely Facilitative Role, Educative Role, Representative Role, and Technical Role. The findings of this study indicate that the role of the National Narcotics Board of North Sumatra Province in preventing drug abuse among adolescents has been running well, but still not optimal. Obstacles in the implementation of the prevention role are still found, namely the lack of human resources in the field of prevention, uneven socialization in all drug-prone areas, budget limitations and problems in the technical role, namely the unavailability of comprehensive data related to drug abuse.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|--|--|
| <p>Koresponden Asrina Putri Hasibuan <i>aasrinaputri@gmail.com</i></p> <p>Kata kunci: penyalahgunaan narkoba, narkotika, pencegahan</p> <p>Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</p> <p>Hal: 1240-1253</p> | <p>Masalah penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja, merupakan ancaman yang serius bagi suatu negara. Laporan "Indonesia Drugs Report 2022, yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), mengindikasikan bahwa pada tahun 2021, sebanyak 4,8 juta orang berusia 15-65 tahun terpapar atau pernah menggunakan narkoba. Angka ini meningkat dari 4,5 juta orang pada tahun 2019. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara memainkan peran penting dalam inisiatif pencegahan karena tingginya angka penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Para peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebagai alat bantu penelitian. Data yang terkumpul dievaluasi dengan menggunakan teori peran yang diartikulasikan oleh Jam Ife dan Frank Tesoriero, yaitu Peran Fasilitatif, Peran Edukatif, Peran Perwakilan, dan Peran Teknis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sudah berjalan dengan baik, namun masih belum optimal. Hambatan dalam pelaksanaan peran pencegahan masih ditemukan, yakni kurangnya sumber daya manusia di bidang pencegahan, sosialisasi yang kurang merata di seluruh wilayah rawan narkoba, keterbatasan anggaran serta masalah pada peran teknis yaitu belum tersedianya data komprehensif terkait penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara bagi kalangan remaja.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.</i></p> |

PENDAHULUAN

Pada saat ini, penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional yang membahayakan pencapaian tujuan negara dan membahayakan generasi muda di Indonesia karena dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkoba, terutama narkotika, berpotensi mengubah seseorang yang tadinya baik menjadi pelanggar hukum.

Undang-Undang Narkotika, atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menjadikan penyalahgunaan narkotika sebagai tindakan ilegal. Siapa pun yang menggunakan narkotika secara ilegal atau tanpa izin yang sah dianggap sebagai penyalahguna menurut Pasal 1 ayat 15. Angka kejadian overdosis narkotika di Indonesia meningkat setiap tahunnya, berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan resmi dan bukti anekdot.

Menurut Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), 4,8 juta orang dalam kelompok usia 15-65 tahun pernah terpapar narkoba pada tahun 2021, menjadikan masalah penyalahgunaan narkoba sebagai masalah yang sangat

mendesak. Informasi ini diperoleh dari Indonesia Drugs Report 2022. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 4,5 juta orang. (Indonesia Drug Report, 2021).

Dengan angka 6,5%, Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Populasi pengguna narkoba di Sumatera Utara mencapai 1,5 juta orang pada tahun 2022. Menurut data mengenai area rawan narkoba yang dipublikasikan oleh BNN RI pada tahun 2022, ada 1.192 wilayah yang termasuk dalam kategori berisiko dan perlu diwaspadai di Sumatera Utara. Dengan 6.077 kasus narkoba yang dilaporkan pada tahun 2022, Sumatera Utara menduduki peringkat teratas dalam hal pengungkapan kasus narkoba, seperti yang dicatat oleh Badan Narkotika Nasional. Adapun provinsi yang menempati urutan tertinggi untuk jumlah hasil positif dari tes urine, Sumatera Utara memiliki 237 orang dari 26.755 orang yang dinyatakan positif menggunakan narkoba. (Puslidatin, 2022).

Identitas dan pencarian jati diri merupakan fokus penting selama masa remaja. Sebagai sarana untuk memperkuat rasa diri mereka, remaja sering kali mengasimilasi berbagai nilai dan konvensi baru. Dalam hal mencoba hal-hal baru, terutama yang mungkin berbahaya atau berisiko, remaja memiliki selera yang tak terpuaskan untuk berpetualang dan rasa ingin tahu yang tinggi (perilaku pengambilan risiko). Remaja yang menggunakan narkoba sering pertama kali mencobanya atas undangan teman atau kelompok sebaya. Remaja yang berada dalam situasi ini cenderung ragu-ragu untuk menolak tawaran tersebut karena berbagai alasan, termasuk namun tidak terbatas pada: tekanan sosial, keinginan untuk menyesuaikan diri, kebutuhan yang besar untuk mencoba sesuatu yang baru, keinginan yang besar untuk melarikan diri dari situasi saat ini, perasaan terisolasi, dan keinginan yang besar untuk menyelesaikan masalah mereka (Pramono, 2003).

Dalam hal pencegahan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera bertanggung jawab dalam berbagai hal. Salah satunya adalah memunculkan ide-ide untuk program dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko narkoba dan bagaimana membangun ketahanan diri masyarakat dari penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, BNNP Sumatera Utara juga menyelenggarakan pelatihan bagi para pendidik atau instruktur bimbingan konseling sebagai bagian dari tugas mereka dalam mencegah penggunaan narkoba. Pencegahan kecanduan narkoba di kalangan anak-anak dapat sangat ditingkatkan dengan pelaksanaan program pelatihan narkoba untuk guru bimbingan konseling. Ada total 18 peserta dalam program ini, meskipun terbatas pada guru BK dari 6 sekolah. BNN Pusat memilih sekolah-sekolah yang guru BK-nya mendapatkan pelatihan. Karena pelatihan ini tidak disebarluaskan secara merata ke seluruh institusi di Sumatera Utara, maka dapat dikatakan bahwa pelatihan ini kurang maksimal.

Karena penyalahgunaan narkoba sangat umum terjadi di Sumatera Utara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara harus berperan aktif dalam kampanye anti-penyalahgunaan narkoba. Menurut situs berita detik.com, delapan dari sepuluh anak yang sering mengunjungi warnet adalah pecandu narkoba, baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi pecandu narkoba, sehingga isu penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda Sumatera Utara sangat mengkhawatirkan. Informasi ini dikumpulkan melalui upaya bersama oleh Kesbangpol dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Penggerebekan terhadap warnet-warnet di Sumatera Utara memberikan hasil sebagai berikut (Detik.com, 2021).

Seperti yang dinyatakan dalam UU No. 35 Tahun 2009, Rinayanti (2018) menyelidiki fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Dengan menggunakan metodologi normatif empiris, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan pemerintah saat ini tidak memadai serta peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga masih kurang yang menunjukkan bahwa terdapat kendala yang dihadapi dalam bidang sumber daya manusia dan infrastruktur. Penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti dalam menganalisis Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya di Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai "Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja."

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Teknik penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran lembaga dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena sesuai dengan karakteristik fenomena yang ingin dipahami secara kontekstual, yang berakar pada filsafat post-positivisme (Sugiyono 2021: 18). Metode-metode ini mencakup peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang melibatkan triangulasi (instrumen gabungan), analisis data secara induktif dan kualitatif, dan penekanan pada makna daripada generalisasi dalam hasil penelitian kualitatif. Sementara itu, metode penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Para peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian ini membutuhkan wawancara mendalam, dinamis, dan mencakup banyak hal. Selain itu, para peneliti yang menggunakan teknik deskriptif memberikan penekanan yang sama pada pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini menggunakan indikator peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero yang meliputi indikator peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Lokasi Penelitian

Sugiyono (2017:399) menyatakan bahwa tempat penelitian situasi sosial adalah lokasi penelitian. Misalnya, di tempat tinggal, tempat usaha, gedung pemerintahan, jalan raya, dan pasar, dan tempat lainnya. Penulis melakukan konsultasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan fakta dan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang muncul. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk mengurangi penggunaan narkoba, oleh karena itu lokasi penelitian ini dipilih. Jalan Balai Pom No.1 Blok A, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia merupakan alamat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, tempat dimana penelitian ini dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Sumatera Utara

Tugas Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Badan Narkotika Nasional melakukan penelitian di berbagai bidang, termasuk pencegahan. Berikut ini adalah tanggung jawab dari domain Pencegahan:

1. “Melaksanakan kegiatan desiminasi informasi P4GN di Bidang Pencegahan dan peredaran gelap narkotika di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
2. Melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan di Sumatera Utara wilayah Provinsi.
3. Melaksanakan kegiatan advokasi kabid di bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara wilayah Provinsi.
4. Membuat rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan di bidang pencegahan.
5. Membuat pertanggung jawaban keuangan pada bidang pencegahan.
6. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada kepala BNN Provinsi Sumatera Utara guna mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam program pencegahan.
7. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang program pencegahan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah maupun swasta terkait dalam bidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
9. Membuat laporan kegiatan.
10. Melaksanakan bimbingan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada BNN Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara.
11. Melaksanakan pembentukan kader penyuluh anti narkotika di lingkungan Pemerintah maupun swasta, pelajar maupun lingkungan kampus.”

Peran Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

Membangun ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan tujuan dari bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, pekerjaan bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran tentang kampanye Stop Narkoba dan risiko yang ditimbulkan oleh narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Menyebarkan informasi juga termasuk memberi tahu orang-orang tentang program rehabilitasi dan tindakan hukum yang diambil terhadap perdagangan narkoba ilegal.
2. Memperjuangkan Penghapusan Peredaran Gelap Narkoba dan Pencegahan Penyalahgunaan di Institusi Publik, Swasta, dan Akademik. Setiap institusi publik, swasta, dan akademis akan bekerja untuk mencapai tujuan bersama dalam mengurangi penggunaan narkoba dengan merumuskan peraturan dan regulasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di kampus. Setiap lembaga berkontribusi dengan membuat kebijakan anti narkoba, sehingga BNN bukan satu-satunya yang bekerja untuk mencegah penyalahgunaan dan memberantas peredaran gelap narkoba.
3. Mendorong Keterlibatan Aktif Masyarakat. Setelah pemahaman bersama tentang risiko penggunaan narkoba dan pentingnya kebijakan berwawasan anti-narkoba di

kalangan masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan, BNNP akan membekali mereka melalui pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mencegah risiko narkoba dengan cara yang mandiri, kreatif, inovatif, dan tepat guna. Pelatihan untuk pelatih untuk menginstruksikan satgas anti narkoba adalah salah satu komponen pengembangan kapasitas. Komponen lainnya termasuk lokakarya untuk membantu fasilitator dalam menciptakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba, pertemuan konsolidasi untuk membahas dan meningkatkan strategi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, dan pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas upaya ini secara independen.

Analisis Peran Bidang Pencegahan BNNP Berdasarkan Indikator Peran

Untuk menggambarkan fungsi BNNP Sumut, peneliti menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Jam Ife dan Frank Tesoriero (2008).

1. Peran Fasilitatif

Memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui penggunaan sumber daya yang ada dan memberikan dorongan dan dukungan kepada kelompok-kelompok tertentu adalah dua tanggung jawab penting.

a. Semangat Sosial

Sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Wong (2009), yang menyatakan bahwa remaja memperoleh rasa memiliki, kekuatan, dan kekuasaan dari dukungan kuat yang mereka terima dari teman sebayanya, baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, ketika teman-teman sebaya atau memiliki tingkat kedewasaan yang sebanding, hal ini membantu remaja merasa tidak sendirian, yang dapat mendorong mereka untuk saling mendukung satu sama lain ketika mereka bekerja menuju kemandirian emosional dan keharmonisan sosial. Sejalan dengan pendapat wong, sangat penting bagi BNNP untuk mendorong remaja berkomunikasi dengan teman sebaya mereka mengenai betapa pentingnya mereka untuk terlibat dalam upaya mencegah penggunaan narkoba.

Berdasarkan beberapa wawancara dengan Bapak Heriyanto dan Ibu Fitri Yani, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk mempromosikan gaya hidup sehat, mengedukasi masyarakat tentang risiko penyalahgunaan narkoba, dan melibatkan remaja dalam berbagai kegiatan positif yang dapat mencegah penggunaan narkoba. Ini semua merupakan bagian dari semangat sosial badan tersebut. Menurut hasil wawancara, keberhasilan berbagai upaya ini dapat dilihat melalui pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja. Pengukuran indeks ketahanan diri remaja dilakukan dengan membagikan kuesioner melalui aplikasi Dektari yang dilakukan dengan responden remaja berusia 12-15 tahun yang telah menerima sosialisasi melalui kegiatan anti narkoba bagi remaja. Namun, kurang dilakukan sosialisasi mengenai program dalam peningkatan indeks ketahanan diri remaja sehingga tidak seluruh masyarakat khususnya remaja mengetahui mengenai program tersebut.

b. Fasilitator Kelompok

Dalam indikator ini, BNNP Sumatera Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan yang secara umum mencerminkan upaya memfasilitasi peningkatan pemahaman masyarakat khususnya remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya. Kegiatan tersebut meliputi penyuluhan, seminar, dan pelatihan yang ditujukan kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Selain itu, BNNP melalui tim Indeks Ketahanan Keluarga juga mengadakan pelatihan keterampilan pengasuhan (parenting skill) yang bertujuan memberikan edukasi

kepada orang tua dalam mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba pada anak.

Peneliti menemukan bahwa jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara hanya terdiri dari delapan orang, hal ini mencerminkan adanya keterbatasan struktural yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan program pencegahan, terutama dalam konteks fasilitasi kelompok. Menurut teori peran sosial komunitas yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank, peran sebagai *fasilitator kelompok* mengacu pada kemampuan institusi atau aktor sosial dalam membina, memberdayakan, dan mengorganisasi kelompok masyarakat secara partisipatif, terutama dalam menciptakan ruang dialog, transfer pengetahuan, dan penguatan kapasitas komunitas lokal dalam menangani isu-isu sosial seperti penyalahgunaan narkoba.

Dengan jumlah personel yang sangat terbatas, kemampuan BNNP Sumut dalam menjangkau komunitas khususnya remaja menjadi tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja dan kompleksitas permasalahan narkoba di daerah tersebut. Keterbatasan jumlah staff bidang pencegahan juga mengakibatkan beban kerja yang tinggi, rendahnya intensitas pendampingan komunitas, serta kurang optimalnya fasilitasi pelatihan.

Dalam perspektif Jim Ife, peran fasilitator kelompok tidak hanya soal mentransfer informasi, tetapi juga membangun kapasitas kritis masyarakat agar mampu menjadi subjek aktif dalam gerakan pencegahan narkoba. Namun, dengan keterbatasan SDM yang ada, BNNP lebih cenderung menjalankan pendekatan top-down yang informatif daripada pendekatan partisipatif-transformatif yang menjadi esensi dari fasilitasi komunitas.

c. Pemanfaatan Berbagai Keterampilan dan Sumber Daya

Kemampuan dan sumber daya remaja dapat ditingkatkan melalui kegiatan ini, yang tujuannya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memerangi penggunaan narkoba. Sebagai bagian dari misinya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menyelenggarakan lomba gerakan anti-narkoba. Tujuan dari acara ini adalah untuk melibatkan lebih banyak orang dalam memerangi narkoba, terutama kaum muda dan pelajar.

Penyelenggaraan lomba anti narkoba oleh BNNP Sumatera Utara juga memiliki peran strategis dalam menumbuhkan keterampilan, kreativitas, dan daya imajinasi kalangan remaja. Remaja didorong untuk mengekspresikan ide-ide preventif dalam bentuk karya melalui kompetisi cipta lagu anti narkoba, festival musik serta karya tulis tentang isu narkoba. Kontribusi BNNP dalam peran ini dapat ditelusuri melalui pemanfaatan media sosial, khususnya akun resmi @infobnn_prov_sumut, yang mengunggah informasi dan dokumentasi terkait kompetisi gerakan anti-narkoba. Meskipun pendekatan BNNP dalam mengadakan lomba anti-narkoba dapat meningkatkan keterampilan remaja, evaluasi terhadap dampak transformasional kegiatan tersebut tetap perlu dilakukan.

2. Peran Edukasi

Peran pendidikan didefinisikan sebagai tanggung jawab dan kemampuan seseorang dalam kaitannya dengan kegiatan pendidikan (Jim & Ife, 2014: 548). Posisi yang berhubungan dengan informasi yang mendorong partisipasi dalam mengejar

pemahaman yang lebih besar dan peningkatan kesadaran melalui penyebaran informasi baru dan pengembangan keahlian yang ada.

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara bertugas memberikan informasi, pengetahuan, dan pelatihan yang sifatnya mengedukasi kelompok masyarakat lain dalam tujuan meningkatkan kesadaran bagi remaja. Salah satu jalan dalam menerapkan peningkatan kesadaran remaja dilakukan dengan mensosialisasikan tentang jenis-jenis narkoba serta dampak kesehatannya. Upaya ini dilakukan melalui paparan materi slide yang menyorot tentang adiksi mengenai bahaya kecanduan serta resiko kesehatan bagi pengguna narkoba. Sosialisasi dengan pemaparan materi slide cenderung bersifat satu arah umumnya lebih informatif tetapi kurang efektif dalam meningkatkan partisipasi remaja. Remaja lebih merespons terhadap pendekatan yang bersifat interaktif. Pendekatan yang interaktif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya remaja dalam berpikir kritis tentang penyalahgunaan narkoba.

b. Memberikan Informasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi atau talkshow guna memberikan informasi tentang penyalahgunaan narkoba, peneliti menemukan bahwa sosialisasi hanya dilakukan pada beberapa sekolah saja. Setiap tahun, penentuan target untuk sosialisasi bahaya narkoba dilakukan pada satu daerah saja. Pada tahun 2023, beberapa sekolah di wilayah Kota Matsum I dan Kota Matsum IV dipilih sebagai fokus sosialisasi tatap muka/talkshow anti narkoba. Pelaksanaan sosialisasi dinilai kurang merata karena tidak menyentuh kelompok remaja yang berada di daerah-daerah rawan narkoba lainnya di Sumatera Utara, seperti daerah Belawan. BNNP Sumut menghadapi masalah keterbatasan anggaran sehingga sosialisasi tidak dapat dilakukan pada seluruh daerah rawan narkoba di Sumatera Utara.

Tabel 1. Data Sekolah yang dilakukan Informasi & Edukasi

| No | Sekolah | Wilayah |
|----|---------------------------|--------------------------|
| 1 | SMK Telkom 2 Medan | Kelurahan Kota Matsum II |
| 2 | SMK Dwiwarna Medan | Kelurahan Teladan Barat |
| 3 | SMA Muhammadiyah 1 Medan | Kelurahan Kota Matsum II |
| 4 | SMA Kesatria | Kelurahan Teladan Barat |
| 5 | SMA Nurul Islam Indonesia | Kelurahan Teladan Barat |

Sumber: BNNP Sumatera Utara, 2024

c. Pelatihan

Indikator ini dapat dilihat melalui penyelenggaraan pelatihan soft skill dan sosialisasi kepada guru bimbingan konseling dari beberapa sekolah. Materi yang disorot dalam sosialisasi tersebut membahas tentang kebijakan dan strategi untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Berikut merupakan data pelatihan bagi guru bimbingan konseling penyelenggaraan sosialisasi:

Tabel 2. Data Pelatihan Bagi Guru Bimbingan Konseling

| No | Nama Sekolah | Jumlah |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | SMK Santo Paulus Medan | 3 |
| 2 | SMK Teladan Medan | 3 |
| 3 | SMK Muhammadiyah 9 Medan | 3 |
| 4 | SMA Primbana Medan | 3 |
| 5 | SMA Namira Medan | 3 |
| 6 | SMK Telkom 2 Medan | 3 |

Sumber: BNNP Sumatera Utara, 2024

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa penentuan target pelatihan bagi guru bimbingan konseling hanya dilakukan dengan sekolah-sekolah yang umumnya merupakan sekolah swasta dan tidak semua guru bimbingan konseling tersebut berasal dari sekolah yang berada pada kawasan rawan narkoba. Pelatihan ini dinilai kurang merata dan tidak inklusif dikarenakan hanya dilakukan untuk beberapa sekolah khusus yang ditunjuk oleh pusat. Pelaksanaan pelatihan yang hanya menargetkan sekolah tertentu menyebabkan kesenjangan kapasitas di antara guru bimbingan konseling. Kesenjangan akses pelatihan yang tidak menjangkau sekolah-sekolah yang berada di daerah rawan narkoba lainnya dapat menyebabkan sekolah-sekolah yang tidak terpilih menjadi tertinggal dalam pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba di lingkungan remaja. Ketidaktepatan skala prioritas dalam pelatihan guru bimbingan konseling juga menyebabkan upaya pencegahan tidak menjangkau kelompok remaja yang paling membutuhkan intervensi seperti daerah-daerah yang tergolong rawan yaitu kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi, daerah perbatasan atau area yang diketahui sebagai jalur distribusi narkoba.

3. Peran Representatif

Peran representasi yaitu peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran seseorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat.

a. Memperoleh berbagai sumber daya atau dana

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BNNP Sumatera Utara dalam memerangi penggunaan narkoba adalah keterbatasan sumber anggaran. BNNP Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya bergantung pada dukungan anggaran pusat sebagai sumber anggaran pokok dalam mewujudkan program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Keterbatasan dalam anggaran mengurangi jangkauan program seperti pelatihan dan sosialisasi di seluruh daerah Sumatera Utara secara merata, khususnya di daerah rawan dan terpencil. BNNP Sumut, meskipun bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber dana utama yang bersifat struktural, menunjukkan upaya adaptif dalam mengatasi keterbatasan anggaran. Salah satu bentuk adaptasi tersebut terlihat melalui kerja sama lintas sektor, seperti dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Utara, dalam bentuk bantuan pelatihan, rehabilitasi, dan pembentukan relawan. Kemampuan menjalin kolaborasi ini mencerminkan adanya kapasitas kelembagaan untuk membangun kemitraan strategis, yang sesuai dengan prinsip pada indikator ini.

Selain itu, BNNP juga berupaya memperoleh sumber daya dari sektor non-pemerintah, seperti hibah dari PTPN dan Pelindo, serta memanfaatkan potensi Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta. Strategi ini menunjukkan bahwa BNNP tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuka jalur pendanaan alternatif. Dalam teori Ife dan Tesoriero, kemampuan ini penting agar program komunitas tidak bersifat top-down atau bergantung pada kebijakan pusat, melainkan berbasis lokal dan berkelanjutan secara finansial.

b. Advokasi

Advokasi yang dilakukan oleh BNNP Sumut mencakup berbagai macam inisiatif, dengan tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan pencegahan narkoba dan menggalang dukungan publik dan sumber daya untuk tujuan ini. Sebagai bagian

dari upaya advokasi, BNNP mengunjungi desa-desa yang rawan narkoba dan mendorong kepala desa sebagai pemangku kepentingan untuk membentuk gugus tugas anti-narkoba di desa tersebut. Satgas ini harus terdiri dari pemuda, tokoh agama, dan perwakilan RT/RW, serta anggota masyarakat lainnya. Selain itu, BNNP Sumut mendukung pilihan kepala desa untuk memilih agen pemulihan narkoba karena hal ini merupakan bagian penting dalam membantu mereka yang kecanduan narkoba untuk sembuh. Remaja yang pernah menggunakan atau mencoba menggunakan narkoba dapat memperoleh manfaat secara tidak langsung dari upaya pencegahan sekunder ini.

Upaya BNNP dalam advokasi sebagai bagian dari program pencegahan sekunder merupakan bagian tugas dari Tim Indeks Ketahanan Keluarga dalam meningkatkan ketahanan keluarga yang berpengaruh terhadap peningkatan daya tangkal anti narkoba bagi remaja. Advokasi ini dilakukan di beberapa desa yang merupakan bagian dari daerah rawan narkoba. Namun, advokasi yang dilakukan oleh BNNP mengalami kendala, salah satunya adalah minimnya partisipasi masyarakat desa dalam mendukung program pencegahan penyalahgunaan narkotika. Minimnya keterlibatan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman terhadap urgensi permasalahan narkoba, tidak adanya insentif atau dukungan anggaran desa untuk program pencegahan, serta fokus masalah lebih kepada infrastruktur sehingga isu sosial seperti narkoba menjadi prioritas rendah.

c. Menggunakan Media

Pendidikan dan penyebaran informasi adalah tujuan lain dari penggunaan media. Melalui berbagai media seperti televisi, radio, media cetak, dan media sosial, BNNP Sumut memberikan informasi edukatif sebagai inisiatif pencegahan penyalahgunaan narkotika. Informasi yang dipaparkan mencakup rincian tentang berbagai jenis narkoba, efeknya, metode pencegahan, dan sumber daya yang tersedia untuk membantu remaja dalam memahami bahaya narkoba dan mencari bantuan rehabilitasi. BNNP membagikan edukasi pencegahan yang luas dengan menggunakan media.

Sejalan dengan hasil wawancara, peran BNNP dalam menggunakan media dijelaskan sebagai berikut:

“Peran BNNP dalam memanfaatkan media sebagai informasi publik dalam upayaantisipasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui berbagai media, seperti media online berita, radio, televisi dan platform media sosial seperti Youtube yang dikelola oleh humas, instagram yang aktif membagikan unggahan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh BNN, lalu ada juga media luar ruang seperti baliho dengan tulisan lindungi diri dari narkoba, kemudia ada videotron yang letaknya di Simpang Kayu Besar Tamora. Ada juga branding sarana publik berbentuk stiker, poster, banner di saran publik untuk mengkampanyekan bahaya narkotika.” (Wawancara dengan Bapak Heriyanto, 5 April 2024)

Berdasarkan data hasil wawancara di atas, langkah ini sejalan dengan pendekatan Ife dan Frank yang menekankan pentingnya akses terhadap informasi khususnya bagi komunitas yakni remaja. Media menjadi instrumen pembelajaran kolektif yang dapat membentuk kesadaran kritis masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap isu-isu sosial seperti bahaya narkoba. Oleh karena itu, peran BNNP dalam menjangkau masyarakat melalui media mencerminkan upaya membangun kesadaran kolektif (collective consciousness) dan memperluas jangkauan edukasi.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan adanya keterbatasan dalam optimalisasi media daring(online), khususnya dalam hal strategi komunikasi yang adaptif terhadap karakteristik target audiens, yaitu remaja. Berdasarkan wawancara, BNNP tidak memiliki data yang jelas mengenai profil demografi target audiens, sehingga efektivitas pesan-pesan yang disampaikan tidak dapat diukur secara komprehensif. Padahal, menurut teori Ite, penggunaan media yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan konteks budaya, sosial, dan perilaku komunikasi komunitas, yakni remaja, dalam mendukung program pencegahan. Selain itu, konten yang dibagikan oleh BNNP Sumut melalui media sosial dinilai masih cenderung bersifat informatif satu arah dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan kreatif, partisipatif, dan interaktif yang relevan dengan perilaku konsumsi media di kalangan remaja.

4. Peran Teknis

Dalam perspektif teori pemberdayaan komunitas yang dikemukakan oleh Jim Ite dan Frank Tesoriero, peran teknis menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan komunitas yang partisipatif dan berkelanjutan. Peran teknis merujuk pada dukungan profesional seperti pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan perencanaan program berbasis bukti (*evidence-based planning*). Tanggung jawab ini dapat dipenuhi dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengumpulkan data dan informasi yang dapat digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk pengembangan staf dan, secara khusus, untuk mengatasi masalah terkait narkoba di provinsi tersebut.

Dalam pengumpulan dan analisis data, BNNP Sumut tidak melakukan penelitian karena penelitian ini bukanlah wewenang dari bidang pencegahan BNNP Sumut. Penelitian dilakukan oleh Puslidatin BNN RI. Jadi, statistik tingkat penyalahgunaan narkoba, kasus narkoba, dan metrik serupa berasal dari database nasional atau studi penelitian terpusat. Dalam perannya sebagai ketua tim untuk Indeks Ketahanan Keluarga, Bapak Heriyanto mengatakan:

"Bidang pencegahan BNNP tidak melakukan penelitian karena bukan wewenang dari bidang kami, penelitian dilakukan oleh Puslidatin BNN RI." (Wawancara dengan Bapak Heriyanto, 5 April 2024)

Sejalan dengan pernyataan dari Bapak Renzi Sanjaya yang menyatakan bahwa:

"BNNP Sumut khususnya bidang pencegahan tidak melakukan penelitian khusus provinsi Sumatera Utara, memang penelitian merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan untuk mengumpulkan data akurat penyalahgunaan narkotika yang ada di berbagai Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara, namun karena terkendala dana yang terbatas, sehingga kami hanya mengandalkan data dari pusat BNN RI." (Wawancara dengan Bapak Renzi Sanjaya, 13 Mei 2024)

Salah satu kendala strategis yang signifikan dalam menangani masalah narkoba di Provinsi Sumatera Utara adalah terbatasnya ketersediaan data yang akurat dan terperinci. Informasi mengenai frekuensi penggunaan, karakteristik demografis pengguna, serta pola kecenderungan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja masih sangat minim atau belum terdokumentasi secara sistematis. Data tersebut merupakan elemen krusial dalam merancang program pencegahan yang berbasis bukti (*evidence-based intervention*) yang diperlukan sebagai analisis kebutuhan nyata di lapangan untuk menjawab kebutuhan spesifik setiap daerah.

Ketiadaan data yang komprehensif di tingkat daerah, khususnya di Sumatera Utara, menyebabkan kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program

pengecahan yang efektif dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi teknis BNNP dalam hal riset lokal, survei wilayah, serta pemetaan sosial terkait perilaku penggunaan narkotika di kalangan remaja. Data ini tidak hanya penting untuk merancang program, tetapi juga untuk memantau dan mengevaluasi dampak program secara berkala, sebagaimana ditegaskan dalam pendekatan teknis oleh Ife dan Frank.

SIMPULAN

Berikut ini adalah temuan peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait keterlibatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, di mana terdapat beberapa indikator yang berperan:

1. Pada indikator peran fasilitatif, BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika telah berjalan secara optimal pada sejumlah indikator. Namun, pada indikator fasilitator kelompok, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia. Temuan menunjukkan bahwa hanya terdapat delapan pegawai yang bertugas di bidang pencegahan, sehingga kapasitas untuk menjangkau remaja secara luas, khususnya dalam kegiatan sosialisasi pencegahan menjadi kurang maksimal.
2. Peran edukatif sebagai bentuk pencegahan dini dilakukan BNNP Sumatera Utara melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Namun, implementasi peran ini masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait keterbatasan anggaran yang menyebabkan kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah rawan narkoba. Selain itu, pelaksanaan pelatihan dinilai belum merata dan kurang inklusif karena hanya difokuskan pada sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk oleh pusat.
3. Peran representatif BNNP Sumatera Utara telah dijalankan secara cukup optimal, tercermin dari komitmen institusi dalam mengupayakan berbagai sumber daya dan pendanaan, meskipun terdapat keterbatasan alokasi anggaran dari pusat. Namun, pada indikator advokasi dan penggunaan media, masih diperlukan optimalisasi strategi agar pelibatan dan jangkauan terhadap kelompok remaja sebagai target utama pencegahan dapat ditingkatkan secara lebih efektif.
4. Terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data yang komprehensif terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ketiadaan data yang terperinci mengenai frekuensi, demografi, dan pola penggunaan di wilayah Sumatera Utara menjadi hambatan dalam perencanaan dan implementasi program pencegahan yang berbasis bukti (evidence-based), serta mengurangi efektivitas intervensi yang ditujukan secara spesifik kepada kelompok remaja.

SIMPULAN

Berikut ini adalah temuan peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait keterlibatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, di mana terdapat beberapa indikator yang berperan:

1. Pada indikator peran fasilitatif, BNNP Sumatera Utara dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika telah berjalan secara optimal pada sejumlah indikator. Namun, pada indikator fasilitator kelompok, efektivitas pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia. Temuan menunjukkan bahwa hanya terdapat delapan pegawai yang bertugas di bidang pencegahan, sehingga

kapasitas untuk menjangkau remaja secara luas, khususnya dalam kegiatan sosialisasi pencegahan menjadi kurang maksimal.

2. Peran edukatif sebagai bentuk pencegahan dini dilakukan BNNP Sumatera Utara melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan serta penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun, implementasi peran ini masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait keterbatasan anggaran yang menyebabkan kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh wilayah rawan narkoba. Selain itu, pelaksanaan pelatihan dinilai belum merata dan kurang inklusif karena hanya difokuskan pada sekolah-sekolah tertentu yang ditunjuk oleh pusat.
3. Peran representatif BNNP Sumatera Utara telah dijalankan secara cukup optimal, tercermin dari komitmen institusi dalam mengupayakan berbagai sumber daya dan pendanaan, meskipun terdapat keterbatasan alokasi anggaran dari pusat. Namun, pada indikator advokasi dan penggunaan media, masih diperlukan optimalisasi strategi agar pelibatan dan jangkauan terhadap kelompok remaja sebagai target utama pencegahan dapat ditingkatkan secara lebih efektif.
4. Terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data yang komprehensif terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ketiadaan data yang terperinci mengenai frekuensi, demografi, dan pola penggunaan di wilayah Sumatera Utara menjadi hambatan dalam perencanaan dan implementasi program pencegahan yang berbasis bukti (evidence-based), serta mengurangi efektivitas intervensi yang ditujukan secara spesifik kepada kelompok remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Sobirin. 2007. *Budaya Organisasi*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Erni Rernawan. 2011. *Organization culture, budaya organisasi dalam perspektif ekonomi dan bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2014 *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, Jim & Frank, Tesoriero. 2008. "Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi". Terjemahan Sastrawan Manullang, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M Taufik Makarnao, dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53
- Pramono, U. Tanthowi. 2003. *Narkoba Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, Jakarta: PBB.
- Robbins, Stephen P., 2008, *Perilaku Organisasi* (alih bahasa Drs. Benjamin Molan), Edisi Bahasa Indonesia, PT Intan Sejati, Klaten.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2014. *Organisasi dan motivasi, dasar peningkatan produktivitas*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Musaddad, Aco. 2018. *Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar*. Polewali Mandar: Gerbang Visual.
- Suhardono, Edy. 2016. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal/Skripsi

- Badan Narkotika Nasional. (2007). Pedoman Pelaksanaan P4GN / Melalui Peran Serta Kepala Desa / Lurah Babinkamtibnas dan PLKB ditingkat Desa/Kelurahan,
- Baharuddin, Muhammad Jihad. (2021). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Kab. Polewali Mandar. *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 591-599.
- Rinayanti. (2018). Peran Badan Narkotika Nasional Badan (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perpestif Undang No 35 Tahun 2009. *Jurnal Al-Dustur*, 1(1), 92-107.
- Rizal, I. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menangani Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
- WHO. (2014). *Health for the World's Adolescents: A Second Chance in the Second Decade*. Geneva, World Health Organization Departemen of Noncommunicable disease surveillance.
- Wong, Donna, L. (2009). Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik. Volume 2. Jakarta: EGC.

Website

- Bnn.go.id. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> diakses pada 04 April 2024 pukul 19.20 WIB).
- Bnn.go.id. <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/> diakses pada 04 April 2024 pukul 19.20 WIB).
- Cegahnarkoba.bnn.go.id. <https://cegahnarkoba.bnn.go.id/dektara> diakses pada 04 April 2024 pukul 19.20 WIB).
- Portibinews.com. <https://www.portibinews.com/hukum/07819112/bnn-sumut-sosialisasi-p4gn-bagi-guru-bimbingan-konseling-smasmk-kota-medan> diakses pada 09 Juni 2024 pukul 20.30 WIB).
- Sumut.bnn.go.id <https://sumut.bnn.go.id/sosialisasi-bahaya-narkoba-bagi-remaja-pada-kegiatan-masa/> diakses pada 09 Juni 2024 pukul 20.30 WIB).
- Wordpress.com. <http://juliuskurnia.wordpress.com/2008/04/07/artidefinisi-pengertian-narkobadan-golonganjenis-narkobasebagai-zat-terlarang> diakses pada 04 April 2024 pukul 19.20 WIB).